



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LONTUNG SABUNGAN SITUMORANG
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 521153

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.267.500.000**

1. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI , Rp. 188.000.000
2. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR , HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR , HASIL SENDIRI , Rp. 565.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR , HASIL SENDIRI Rp. 215.500.000
5. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah Seluas 138 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR , HASIL SENDIRI Rp. 161.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 57.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KRISTA Tahun 1999, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI , LAINNYA ,
Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.652.019

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.359.252.019

III. HUTANG Rp. 227.789.567

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.131.462.452

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.